

PERANAN PARA PEMIMPIN DAN PATRIOT BANGSA DALAM MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA

H. Budisantoso S.*)

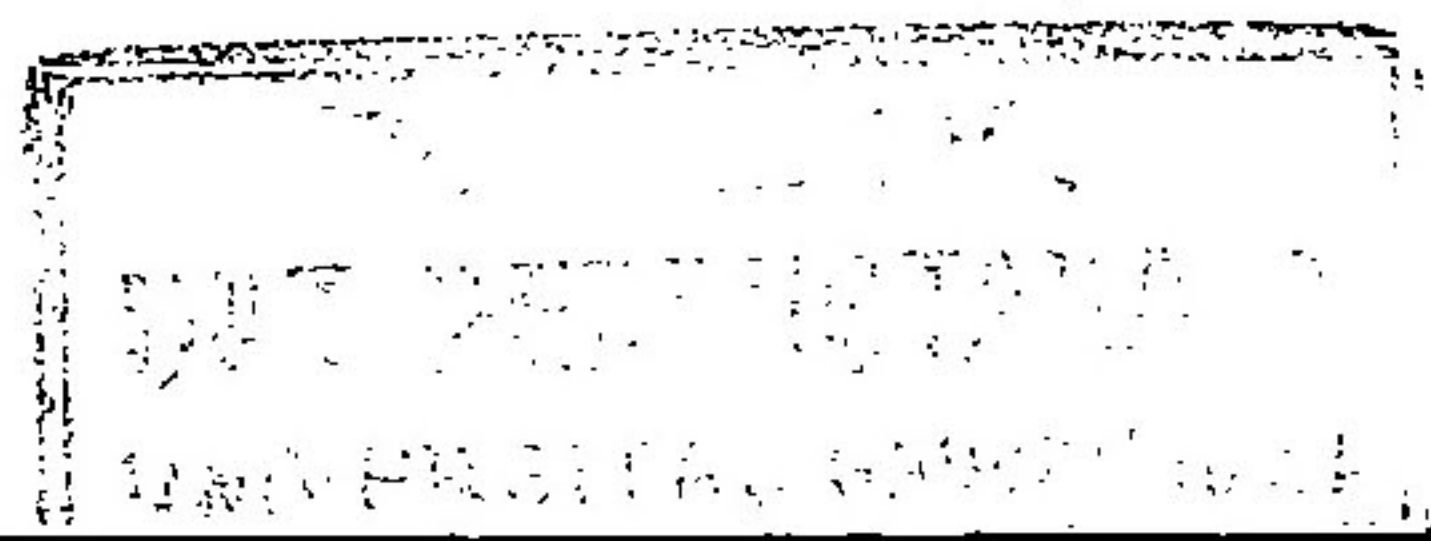
Pada tahun 2002 ini Republik Indonesia telah berusia hampir 57 tahun. Bila dibandingkan dengan usia manusia, dapat digolongkan usia tua yang telah memiliki kematangan (mature) dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Namun bila ditinjau dari umur negara-negara di dunia Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dapat digolongkan anak-anak atau remaja. Anak-anak atau remaja dengan segala sifatnya yang belum "mature", serta masih sering dihindangi penyakit anak seperti anak batuk, pilek, diareha (mencret), dan terluka karena jatuh). Orang tua dan anaknya sendiri terus berupaya agar anak tersebut dapat pulih sehat kembali dari sakitnya, terus dibina dan dididik agar menjadi manusia dewasa yang sehat, kuat jasmani dan rohaninya.

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai pada tahun 2002 ini, Republik Indonesia hampir tidak ada putus-putusnya menghadapi berbagai permasalahan berpa tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG). Di masa lalu TAHG yang dihadapi oleh bangsa dan negara sedemikian beratnya, sehingga diramalkan oleh para pakar Barat, bahwa Indonesia akan *collapse*

dan tidak akan eksis lagi. Namun berkat ketegaran dan kegigihan bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin dan patriot pejuang bangsa, serta berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka bangsa dan negara RI masih dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kondisi konstelasi dan posisi geografi Indonesia dengan kekayaan alamnya, serta kemaje-

*) Mayjen TNI H. Budisantoso S., S.E., Koordinator Tenaga Ahli Kehormatan Lemhannas, Wa Ka Pokja Bang Magister Tannas, Konsultan Pokja Ideologi, Pokja Tannas, Pokja Kepemimpinan Nasional, dan Widyaiswara Geopolitik Geostrategi, dan Ketahanan Nasional Indonesia, Lemhannas.



mukan bangsa, mengandung potensi kekayaan dan budaya yang beraneka ragam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional bagi kesejahteraan dan keamanan seluruh bangsa. Tetapi perlu disadari pula bahwa kondisi tersebut mengandung kerawanan laten, yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik akan merupakan potensi terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan, yang dapat memicu disintegrasi bangsa dan negara.

Sebelum, menjelang dan sesudah kejatuhan Presiden Soeharto, terjadi berbagai kerusuhan sosial politik yang menimbulkan dampak sosial yang besar seperti korban jiwa dan harta benda, pengungsi, pengangguran dan penduduk miskin yang makin bertambah. Di samping itu timbul berbagai kekerasan, teror dan gerakan separatis yang sampai saat ini belum dapat diatasi. Timbul kecemasan dan ketakutan di kalangan masyarakat, serta rasa pesimisme, karena ada pemimpin bangsa yang terkesan tidak terlalu peduli terhadap nasib bangsa dan negara, mereka terus sibuk dengan kepentingan masing-masing. Bila keadaan ini sampai berlarut-larut, Republik Indonesia dapat bercerai-berai dan tercabik-cabik. Cukup Timor Timur saja yang terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi, diakibatkan oleh kesalahan keputusan

pemimpin, jangan sampai ada wilayah lainnya yang lepas dari NKRI. Oleh karena itu para pemimpin dan patriot pejuang Indonesia, wajib kembali membulatkan tekad dan semangat guna mempertahankan eksistensi bangsa dan NKRI. Masih ada kesempatan dan peluang untuk dimanfaatkan dengan kebijaksanaan dan strategi yang tepat, agar NKRI yang berlandaskan Pancasila tetap eksis dan berjaya mewujudkan cita-cita nasional, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dasar Pemikiran

Dalam situasi krisis multi dimensional yang berkepanjangan sejak tahun 1997 sampai saat ini, diperlukan dasar atau landasan pemikiran (paradigma) sebagai pedoman dan acuan dalam berpikir, bersikap dan bertindak guna mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia, dan Konsepsi Ketahanan Nasional sebagai konsepsi pengaturan segenap aspek kehidupan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang serasi. Di samping itu, sesuai situasi aktual yang dihadapi perlu pula diacu tujuan reformasi nasional

dan pentingnya peran kepemimpinan segenap komponen bangsa.

1. Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup negara merupakan pedoman sebagaimana mengenal dan memecahkan berbagai permasalahan yang timbul dalam dinamika masyarakat. Pandangan hidup bangsa mengandung konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan, yaitu gagasan tentang wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila tidak hanya merupakan pandangan hidup bangsa, tetapi juga merupakan dasar negara, yaitu sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara juga dapat disebut sebagai ideologi negara atau ideologi nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Seluruh tatanan bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak dibenarkan dan harus dicabut.

2. UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 meru-

pakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan, serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional.

Pembukaan mengandung Pokok-Pokok Pikiran yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam kehidupan nasional maupun dalam hubungan internasional. Pembukaan yang dirumuskan secara padat dan khidmat dalam empat alinea, mengandung 4 pokok pikiran, yaitu: (a) Negara Persatuan, yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, (b) negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, (c) negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, (d) negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh UUD 1945, karena Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas rangkaian pasal-pasal yang merupakan jbaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, yang tidak lain adalah Pan-

casila. Dalam rangka reformasi nasional, Batang Tubuh UUD 1945 telah tiga kali diamandemen. Amandemen yang pertama dalam rangka mengurangi dominasi kekuasaan Presiden, memberdayakan DPR dan lembaga tinggi negara lainnya, sedangkan amandemen yang kedua adalah dalam rangka otonomi daerah. Kedua amandemen tersebut dalam rangka lebih meningkatkan kehidupan demokrasi dan persatuan Indonesia, serta tetap mengacu pada Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan tuntutan perkembangan zaman amandemen ketiga dan amandemen berikutnya, seyogyanya perlu dikaji secara mendalam dan seksama, agar tidak menyimpang dari Pancasila.

3. Wawasan Nusantara

Dengan mengingat kondisi, konstelasi dan posisi geografis, kekayaan alam yang penyebarannya tidak merata, serta kemajemukan bangsa Indonesia, para pendahulu kita merumuskan Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia. Esensi Wawasan Nusantara mengajarkan mawas ke dalam: mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah nasional sebagai satu kesatuan geopolitik, sedangkan mawas ke luar: mengutamakan kepen-

tingan nasional dan terciptanya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4. Konsepsi Ketahanan Nasional

Mengingat adanya potensi ancaman laten yang sewaktu-waktu dapat meledak, baik dipicu dari dalam negeri maupun luar negeri, atau *link up* dari luar dan dalam negeri, maka bangsa dan negara Indonesia harus selalu memiliki Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional harus dibangun secara komprehensif integral agar segenap aspek kehidupan nasional dapat terintegrasi dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, sehingga berisi keuletan dan ketangguhan bangsa yang mampu dikembangkan menjadi kekuatan nasional untuk mengatasi TAHG.

5. Reformasi Nasional

Pembangunan yang terpusat (sentralistik) dan tidak merata yang dilaksanakan selama masa pemerintahan Orde Baru, ternyata hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamen pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggara negara yang sa-

ngat birokratis, tidak demokratis dan diwarnai KKN, telah mengakibatkan krisis multidimensional yang berkepanjangan, yang telah membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi tersebut, telah menimbulkan tuntutan reformasi di segala bidang. Reformasi nasional dimaksudkan agar bangsa Indonesia mampu bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia, dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Gerakan reformasi menginginkan perbaikan kehidupan nasional terutama untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, supremasi hukum dan penghormatan HAM, pemerintah yang bersih dan berwibawa, pemberantasan KKN, ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

6. Peranan Kepemimpinan segenap Komponen Bangsa

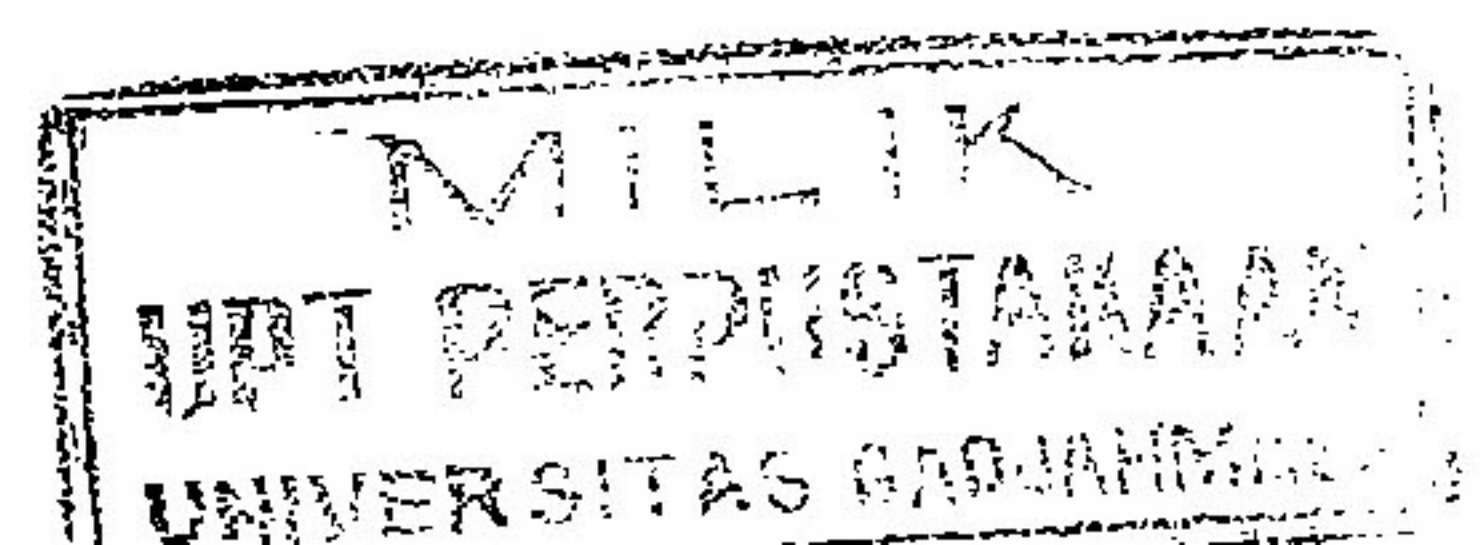
NKRI yang masih merupakan negara yang sedang berkembang (*developing country*), memiliki ciri-ciri yang dominan antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan sum-

ber daya lainnya, seperti modal, penguasaan teknologi, sarana dan prasarana. Sedangkan TAHG yang dihadapi masih sangat besar dibandingkan dengan kemampuan yang ada. Oleh karena itu peranan para pemimpin segenap komponen bangsa sangat dominan dalam mengarahkan, mendorong dan mengerahkan segenap sumber daya, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam rangka menuju ke cita-cita dan tujuan nasional. Di samping itu diperlukan kesepakatan di antara para pemimpin dan patriot bangsa, serta para pakar dalam berpikir, bersikap dan bertindak secara arif demi kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan/daerahnya saja.

Kondisi saat ini dan permasalahannya

1. Politik dan Hukum

Akibat ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tinggi negara yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan Presiden Soeharto yang berlebihan, telah melahirkan budaya KKN, sehingga terjadi krisis multi dimensional, yang diawali oleh krisis moneter. Kondisi dan situasi tersebut telah membangkitkan gerakan reformasi di seluruh



tanah air yang memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI. Gerakan reformasi telah mendorong secara relatif terjadinya kemajuan-kemajuan di bidang politik, usaha penegakan kedaulatan rakyat, kebebasan pers dan peningkatan peran masyarakat, disertai dengan pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan. Pemilu 1999 diikuti multi partai, netralitas pegawai negeri, TNI dan Polri, serta telah terjadi peningkatan partisipasi politik, dan kebebasan pers. Dalam rangka demokratisasi dan desentralisasi, sejak 1 Januari 2001 telah dilaksanakan otonomi daerah (otoda) bagi daerah otonom yang sudah mampu. Namun perkembangan demokrasi dan desentralisasi masih diwarnai menonjolnya kepentingan pribadi, golongan dan primordialisme suku/agama/daerah, seringkali disertai dengan pengerahan massa yang beringas dan brutal, dan politik uang (*money politics*).

Konflik sosial dan menguatnya separatis di berbagai daerah, terutama di Propinsi D.I. Aceh, Irian Jaya, dan Maluku merupakan ancaman bagi keutuhan NKRI. Akar permasalahannya bersumber dari kondisi kesejahteraan yang tidak merata dan perasaan diperlakukan secara

tidak adil pada masa lalu, di samping adanya oknum-oknum dari dalam dan luar negeri yang memanfaatkan kondisi dan situasi tersebut untuk mencapai kepentingannya.

Upaya menegakkan supremasi hukum, belum diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum. Kesadaran hukum masyarakat pada umumnya masih kurang, rendahnya mutu pelayanan hukum, serta kepastian dan keadilan hukum, mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Kemauan untuk memberantas KKN, kejahatan ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya, masih diwarnai berbagai kepentingan politik, cenderung mengakibatkan terjadinya krisis hukum. Perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat antara lain dalam bentuk tindakan kekerasan oleh masyarakat, perlakuan diskriminatif, (pengusiran para pendatang, pembantaian terhadap suku atau umat beragama lain), serta berbagai tindakan sewenang-wenang.

2. Ekonomi

Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan

melalui proses reformasi di bidang ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai. Hutang dari luar negeri dan dari dalam negeri makin membengkak sudah mulai jatuh tempo pelunasannya, menjadi beban pemerintah dan masyarakat. Ekonomi kerakyatan berdasarkan mekanisme pasar yang berkeadilan, masih belum dapat diwujudkan. Di samping itu kesenjangan sosial ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku ekonomi, dan antargolongan pendapatan (contoh: gaji pejabat pemerintah, anggota DPR/MPR, dan direksi BUMN, sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan warga masyarakat pada umumnya), telah meluas dalam segenap aspek kehidupan dan di seluruh tanah air. Kondisi ini mengakibatkan perekonomian nasional tidak kokoh, terjadi pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu yang kaya sumber kekayaan alam. Telah terjadi pengelolaan dan pengolahan sumber kekayaan alam yang kurang terkontrol, yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan gangguan terhadap kelestarian alam.

3. Sosial dan Budaya

Banyak perusahaan yang gu-

lung tikar, dan investor luar negeri yang meninggalkan Indonesia, mengakibatkan pengangguran makin meningkat dan meluas, hak dan perlindungan tenaga kerja pada umumnya belum terwujud. Jumlah penduduk miskin makin membengkak, disertai derajat kesehatan masyarakat yang menurun dan kekurangan gizi, dapat berakibat tumbuhnya generasi muda yang kualitas fisik dan inteleginya rendah. Kehidupan beragama belum mampu mendorong peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat pada umumnya. Maraknya penyakit sosial seperti KKN, kriminalitas, narkoba, mengindikasikan terjadinya kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama dengan realitas sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan pendidikan nasional masih dititikberatkan pada *transfer of knowledge* (pengajaran), kurang menekankan pada pengembangan kepribadian nasional dalam kehidupan bermasyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, berbangsa Indonesia dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional, sehingga belum mem-

perkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerjasama dan persaingan global.

Akibat terjadinya krisis yang berkepanjangan terjadi penurunan kesadaran dan semangat kebangsaan (nasionalisme). Demikian pula kesadaran dan semangat bela negara juga cenderung menurun.

4. Pertahanan dan Keamanan

Sebagai akibat penyalahgunaan TNI dan Polri sebagai alat kekuasaan di masa lalu, kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan Polri cenderung menurun. Dalam euforianya reformasi yang kebablasan, telah terjadi kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum, pelanggaran HAM dan gerakan separatis, masyarakat merasa tidak aman dan tenteram, serta mengharapkan Polri dan TNI dapat mengatasi kondisi *chaos* tersebut. Dengan dipisahkan Polri dan TNI, Polri bertugas di bidang keamanan dan TNI bertugas di bidang pertahanan dan penegakan kedaulatan negara, masih memerlukan reformasi intern dan pengaturan mekanisme dan prosedur kerjasamanya. Di samping itu diperlukan peningkatan kesejahteraan anggota TNI dan Polri, serta dukungan alat peralatan utamanya, guna meningkatkan kemampuannya sesuai dengan pembebanan tugas negara.

5. Peran Kepemimpinan Nasional

Dari uraian tentang kondisi dan permasalahan di bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia dari tahun 1997 sampai saat ini menghadapi permasalahan dalam bentuk TAHG yang sangat berat, dibandingkan dengan kemampuannya yang sangat terbatas. Di samping itu cara penanganan masalah juga harus menyesuaikan dengan paradigma baru yang sangat berlainan dengan cara-cara pada masa lalu. Pada masa lampau segala permasalahan cenderung diselesaikan secara otoriter, represif dan sentralistik. Sedangkan pada saat ini dan pada masa mendatang, segala permasalahan harus diselesaikan secara demokratis dengan partisipasi masyarakat secara luas, dan pemberdayaan daerah otonom dengan mengutamakan dialog, serta cara-cara represif hanya digunakan apabila kemerdekaan dan kedaulatan negara terancam. Oleh karena itu peran kepemimpinan segenap komponen bangsa terutama elite politik, baik pada suprastruktur, maupun infrastruktur dan substruktur, serta para pakar, di tingkat pusat dan daerah sangat penting dalam mendorong, mengarah-

kan dan mengerahkan sumber daya, sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia secara bertahap dan konsisten. Sampai saat ini masih terkesan belum ada kesepakatan di kalangan elite politik, baik di supra maupun infrastruktur dan sub-struktur tentang agenda reformasi dan upaya untuk keluar dari krisis. Masing-masing pemimpin dan para pengikutnya cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Dalam situasi krisis yang sangat membebani warga masyarakat golongan menengah ke bawah, para pemimpin masih ada yang secara mencolok hidup dalam kemewahan, bermain politik uang, serta mencari kesempatan untuk memperoleh dana secara tidak syah guna persiapan Pemilu 2004. Ada beberapa elite politik yang demi kepentingannya, berusaha memprovokasi unjuk rasa, terutama dengan memanfaatkan buruh, golongan miskin kota, golongan primordial, mahasiswa dan pemuda, serta golongan yang sakit hati. Mereka menggunakan dalih tuntutan reformasi, HAM, keadilan dan penegakan hukum, namun cara yang digunakan justru tidak demokratis, melanggar HAM dan melanggar hukum. Di samping itu Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dalam eu-

forianya otonomi daerah, justru telah melakukan tindakan yang menyimpang dari prinsip dasar dan sasaran daerah. Tindakan yang kebablasan tersebut, antara lain pengangkatan pejabat daerah yang cenderung diwarnai primordialisme suku/agama/daerah, dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cenderung membebani masyarakat dan para pengusaha, serta makin terkurasnya sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian alam.

Perkembangan Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional. Pengaruh tersebut akan berbentuk kendala dan peluang bagi upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

1. Global

Amerika Serikat (AS). Perkembangan global sangat diwarnai oleh kepentingan Amerika Serikat sebagai super power tunggal, dan kepentingan negara maju lainnya, di bidang politik, ekonomi, dan militer. Isu demokratisasi, HAM dan keles-

tarian lingkungan hidup, cenderung dipaksakan terhadap negara berkembang, walaupun kondisinya belum mendukung berhasilnya memenuhi tuntutan isu tersebut. Pemaksaan ini sering diwarnai oleh standar ganda, disertai tekanan politik, embargo dan bila perlu invansi militer, disesuaikan dengan kepentingan AS dan negara maju lainnya. Namun demi kepentingannya, pemerintah AS dan juga PBB tetap mengakui kedaulatan dan integritas NKRI (minus Timor Timur).

Kekuatan Ekonomi sebagai Senjata. Dalam era perdagangan bebas yang sudah dimulai secara bertahap sejak awal abad ke-21, dapat diperkirakan negara-negara maju yang menguasai modal dan Iptek, akan memegang persaingan dalam perdagangan bebas sesuai kesepakatan WTO. Negara berkembang yang pada umumnya hanya memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar jumlahnya, tetapi rendah kualitasnya, hanya akan menjadi pelengkap penderita saja. Di samping itu kekuatan ekonomi juga dapat digunakan sarana pemaksa terhadap negara berkembang yang masih sangat tergantung pada modal dan pinjaman luar negeri.

Konflik Antaretnik dan Agama. Terjadinya kesenjangan kesejahteraan dan keadilan, serta

berbagai masalah politik, ekonomi dan militer, berakibat timbulnya pengelompokan primordial berdasarkan etnis, suku dan agama. Pengelompokan ini memicu terjadinya konflik horizontal dan vertikal, seperti yang terjadi di Yugoslavia, Rusia, Filipina, dan Indonesia.

Teror Internasional. Akibat ketidakberdayaan menghadapi musuhnya yang lebih unggul di bidang politik, ekonomi dan militer, berbagai kelompok radikal dan ekstrim menggunakan teror terhadap musuh-musuhnya. Dengan teror mereka menunjukkan eksistensinya dan menarik perhatian dunia. Penghancuran WTC *Twin Tower* dan Pentagon pada 11 September 2001 yang lalu, merupakan bentuk teror yang berakibat luas dirasakan di seluruh dunia. Teror yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok radikal yang anti NKRI dan yang mengutamakan kepentingannya sendiri, diperkirakan juga terkait dengan teror internasional.

Narkoba. Perdagangan gelap narkoba sampai saat ini masih belum dapat ditanggulangi, karena jaringannya sudah meliputi seluruh dunia dan menggunakan teknologi yang makin canggih. Perdagangan narkoba di samping untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar, juga dimanfaatkan bagi kepentingan

politik dan militer.

2. Regional

Perkembangan kawasan regional yang langsung berpengaruh terhadap Indonesia adalah Asia Tenggara dan kawasan Pasifik Selatan.

Asia Tenggara. Masih terdapat permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang belum terselesaikan. Di samping itu juga masih terdapat penyelundupan personil senjata dan komoditi dari negara tetangga ke Indonesia dan sebaliknya.

Pasifik Selatan. Kawasan ini didominasi oleh Australia yang membawakan kepentingan AS di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Hubungan Indonesia dengan Australia mengalami pasang naik dan pasang surut dipengaruhi oleh partai mana yang berkuasa.

3. Nasional

Geografi. Kondisi, konstelasi dan posisi geografi Indonesia sangat strategis sehingga negara-negara maju sangat memperhatikan perkembangan politik di Indonesia, untuk menjamin kepentingannya, khususnya untuk lintas laut, baik bagi pelayaran komersial maupun militer. AS dan sekutunya akan selalu berusaha agar Indonesia tidak berada di bawah pengaruh negara yang

potensial akan menjadi musuh AS.

Kekayaan Alam. Kekayaan alam Indonesia terutama di daratan dan perut bumi sudah dimanfaatkan secara besar-besaran yang cenderung kurang terkontrol mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian alam. Namun masih cukup potensi kekayaan alam yang belum dimanfaatkan, terutama kekayaan alam yang terbarukan baik di darat maupun di laut dan di udara.

Kependudukan. Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta jiwa dengan pertumbuhan yang relatif masih tinggi \pm 1,7% per tahun. Kondisi seperti ini akan menjadi beban, bila kualitasnya masih tetap rendah. Dengan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pasar yang besar bagi produk dari dalam dan luar negeri.

Ideologi. Dalam euforianya reformasi Pancasila masih belum secara sungguh-sungguh diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, walaupun Pancasila oleh MPR ditetapkan sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasional. Bahkan ada sebagian dari bangsa Indonesia yang ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis, agama atau liberal.



Politik. Reformasi telah mendorong secara relatif terjadinya kemajuan dalam kehidupan politik yang semakin demokratis, dan telah diupayakan secara sungguh-sungguh desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah. Namun pemahaman tentang demokrasi dan otonomi daerah, serta pentingnya peran kepemimpinan segenap komponen bangsa, masih rendah. Dorongan untuk mewujudkan supremasi hukum cukup kuat, tetapi masih belum terwujud.

Ekonomi. Krisis ekonomi yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun masih belum dapat teratasi. Kesenjangan sosial ekonomi cenderung makin melebar. Tidak stabilnya politik dan keamanan, serta tuntutan golongan buruh/pekerja yang berlebihan, dan timbulnya konflik horizontal dan vertikal, menyebabkan para investor masih menunggu situasi yang lebih kondusif untuk menginvestasikan modalnya. Dalam situasi krisis usaha menengah dan kecil yang tidak sangat tergantung pada modal dan bahan baku dari luar negeri, memiliki ketahanan yang cukup baik.

Pemerintah terus berupaya untuk memperoleh hutang dari IMF dan negara donor untuk menutup defisit APBN, yang mengakibatkan jumlah hutang yang makin membengkak.

Sosial dan Budaya. Taraf hidup dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung menurun. Demikian pula moral, etika dan kesadaran berbangsa Indonesia juga cenderung merosot. Namun dengan sistem pendidikan dalam arti luas yang ada, masih dapat dioptimalkan hasilnya. Demikian pula dengan pendidikan agama masih dapat ditingkatkan guna memberi landasan moral dan etika dalam segenap aspek kehidupan serta meningkatkan kembali kesadaran dan semangat kebangsaan.

Pertahanan dan Keamanan. Permasalahan yang tidak dapat teratasi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya bermuara menjadi masalah pertahanan dan keamanan. Sesuai tuntutan reformasi, TNI dan Polri sedang melaksanakan reformasi intern dan membebani mekanisme dan prosedur kerjasama antara TNI dan Polri, juga dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otoda, dan pelaksanaan fungsi teritorial. Bersamaan dengan proses reformasi tersebut, TNI dan Polri dituntut terus untuk melaksanakan tugas menjamin keamanan dan kedaulatan negara, dengan kondisi dukungan alat peralatan dan logistik yang kurang memadai. Namun Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya

pada upacara Parade Hari Ulang Tahun TNI ke-56 pada 5 Oktober 2001, menyatakan bahwa pemerintah secara bertahap akan meningkatkan kemampuan TNI dan kesejahteraan para prajurit.

4. Peluang dan Kendala

Peluang. Sebagai peluangnya antara lain: (1) Kepentingan AS menghendaki tetap utuhnya NKRI, (2) Indonesia sebagai anggota IMF tidak mendapatkan pinjaman dana dan bantuan lainnya, (3) Indonesia yang anti teror dan telah mengalami teror sejak lama, dapat menjalin kerjasama internasional anti teror dan juga anti narkoba, (4) Kerjasama Asean dan hubungan dengan Australia dapat ditingkatkan kembali dalam rangka *win win solution* mengatasi berbagai masalah, (5) Geografi, kekayaan alam dan penduduk Indonesia masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional, (6) Pancasila ditetapkan oleh MPR sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasional, merupakan pemersatu bagi bangsa Indonesia yang majemuk, (7) Reformasi nasional yang sedang berlangsung sejalan dengan isu internasional tentang demokratisasi, HAM dan kelestarian lingkungan hidup. Demikian pula penyelenggaraan Oto-

da dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan masyarakat serta memperkuat NKRI, (8) Ekonomi kerakyatan yang sudah ada masih dapat ditingkatkan berdasarkan mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia, khususnya potensi kelautan, (9) Penduduk Indonesia yang religius dengan sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, termasuk para pemimpin komponen bangsa/elite politik guna mendapatkan wawasan kenegaraan yang lebih luas, serta komprehensif integral melalui pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan atau pendidikan intern pada infra dan substruktur, dan (10) TNI dan Polri tetap solid, reformasi intern sedang berlangsung sesuai tuntutan reformasi. Sudah ada *political will* untuk meningkatkan kemampuan TNI dan Polri, serta kesejahteraan prajurit.

Kendala. Sebagai kendalanya antara lain: (1) AS dan sekutunya menggunakan standar ganda dalam menerapkan norma demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Kekuatan ekonomi digunakan sebagai senjata untuk memaksakan kehendaknya, (2) Jaringan teror interna-

sional diperkirakan sudah meluas ke beberapa negara termasuk di Asia Tenggara, (3) Hubungan dan kerjasama dalam rangka Asean dan hubungan dengan Australia sedang menurun, (4) Potensi geografi, kekayaan alam dan penduduk Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, (5) Ideologi Pancasila belum sungguh-sungguh diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu ancaman dari ideologi lain seperti komunisme, agama dan liberalisme masih ada, (6) Euforia reformasi dan Otoda yang kebablasan, serta kurangnya pemahaman tentang demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan kepentingan nasional, akan mengakibatkan Indonesia belum dapat keluar dari krisis. Di samping itu masih adanya pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama menimbulkan gerakan radikal, (7) Kesenjangan sosial ekonomi yang makin melebar dan masih belum berdayanya ekonomi kerakyatan yang berkedailan, serta pulihnya stabilitas politik dan keamanan mengakibatkan krisis ekonomi masih berkepanjangan, (8) Penduduk miskin, penganggur, dan pengungsi jumlahnya masih membengkak. Berbagai penyakit sosial seperti kriminalitas, unjuk rasa yang brutal, berbagai kon-

flik horizontal dan vertikal, mengindikasikan kemerosotan moral dan etika, serta kesadaran dan semangat kebangsaan, dan (10) TNI dan Polri masih terus dihujat dan dituntut atas pelanggaran HAM pada masa lalu, sangat mengganggu konsentrasi TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya.

Kebijaksanaan dan Strategi

Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran, permasalahan yang dihadapi, peluang dan kendala yang timbul, maka diperlukan kebijaksanaan (*policy*) dan strategi yang komprehensif integral untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kebijakan pada dasarnya mengandung arah yang hendak dituju, sedangkan strategi pada dasarnya menentukan cara untuk mencapai tujuan (*strategy: ways to achieve ends with available means*).

1. Kebijakan

Mewujudkan keterpaduan upaya dari segenap pemimpin komponen bangsa dan elite politik, beserta masyarakat secara komprehensif integrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Konsepsi Ketahanan Nasional, guna mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. Strategi

(a) Menyelenggarakan dialog secara terus menerus di antara para pemimpin bangsa baik di tingkat maupun daerah yang didasari oleh *sense of crisis* tentang kepentingan nasional, agenda reformasi, otonomi daerah, demokratisasi, dan masalah nasional lainnya, (b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warganegara sesuai hukum yang berlaku, serta kesadaran bela negara sebagai patriot bangsa, (c) Menyelenggarakan rekonsiliasi dan perdamaian nasional tentang berbagai pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum di masa lalu, agar bangsa Indonesia segera dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, (d) Melanjutkan amandemen batang tubuh UUD 1945 melalui kajian yang mendalam, dalam rangka demokratisasi dengan tetap berdasarkan Pancasila, (e) Mengupayakan supremasi hukum secara bertahap dan konsisten, (f) Pemanfaatan dana pinjaman dari luar negeri seefektif dan seefisien mungkin, untuk keluar dari krisis ekonomi, (g) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berdasarkan mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis sumber kekayaan alam dan SDM nasional, serta pemanfaatan pasar dalam negeri dan luar negeri bagi produk nasional, (h) Penghematan dan efisiensi penggunaan

dana, serta pemerataan beban biaya atau *cost* secara adil dengan penerapan sistem pajak progresif dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, (i) Pemberian santunan dan pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar dan para penganggur, para pengungsi, para veteran pejuang integrasi Timor Timur, (j) Optimalisasi pendidikan nasional, dan pendidikan agama dan budipekerti dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, serta memantapkan kepribadian nasional dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, (k) Penambahan anggaran belanja bagi TNI dan Polri dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan prajurit, (l) Melaksanakan Politik Luar Negeri yang bebas dan proaktif untuk kepentingan nasional, serta meningkatkan kerjasama internasional, khususnya dengan negara-negara Asean dan Australia atas dasar *win win solution*, (m) Pemantapan kepemimpinan para pemimpin dan kader pemimpin bangsa, serta elite politik melalui pendidikan di Lemhannas atau pendidikan intern dalam partai politik, ormas dan kelembagaan lainnya, dalam rangka memperluas wewasaan kenegaraan dan keterpaduan upaya guna mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Penutup

Bangsa Indonesia akan dapat terus berdaya, aman dan sejahtera apabila dapat dijamin persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Bhineka Tunggal Ika dalam NKRI.

Kelangsungan hidup bangsa dan negara akan dapat dipertahankan, apabila dapat diwujudkan

kan keterpaduan upaya dari segenap pemimpin komponen bangsa dan elite politik, yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan patriot bangsa, dengan tetap memegang teguh Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Konsepsi Ketahanan Nasional.